

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Sangiang Kabupaten Bima

Alamsyah Putra<sup>\*1</sup>, Adhitya Bagus Singandaru<sup>2</sup>, Taufan Handika Putra<sup>3</sup>,  
Jumhur Hakim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

\*e-mail: [alamsyahput.03@gmail.com](mailto:alamsyahput.03@gmail.com)<sup>1</sup>, [ab.singandaru.unram.ac.id](mailto:ab.singandaru.unram.ac.id)<sup>2</sup>, [taufan@unram.ac.id](mailto:taufan@unram.ac.id)<sup>3</sup>,  
[jumhur@unram.ac.id](mailto:jumhur@unram.ac.id)<sup>4</sup>

### Riwayat Artikel

Diterima : 17 Oktober 2025  
Direvisi : 17 November 2025  
Diterbitkan : 05 Desember 2025

**Kata kunci:** *Community-based tourism; Desa wisata; Partisipasi masyarakat.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Sangiang di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan perspektif teori partisipasi Arnstein dan Pretty. Desa Sangiang memiliki potensi alam dan budaya yang besar, seperti tradisi maritim, pembuatan kapal phinisi, serta daya tarik wisata alam dan budaya lainnya. Namun, pengembangan destinasi belum optimal karena keterbatasan kapasitas masyarakat, legalitas UMKM, dan belum adanya mekanisme tata kelola yang partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan Model Analisis Interaktif Miles, Huberman, & Saldaña, sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada level consultation, placation, dan functional participation, yang tergolong sebagai partisipasi simbolis (tokenism) dan belum mencapai tingkat pemberdayaan (citizen power). Pada tahap perencanaan, masyarakat terlibat dalam forum musyawarah, namun keputusan strategis tetap didominasi pemerintah. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berperan dalam kegiatan wisata dan UMKM, tetapi tanpa dukungan kapasitas dan legalitas yang memadai. Pada tahap pengawasan, partisipasi bersifat pasif karena tidak terdapat mekanisme evaluasi partisipatif yang jelas. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan Pokdarwis, legalisasi UMKM, serta pembentukan mekanisme perencanaan dan pengawasan yang berbasis kolaborasi dan pemberdayaan. Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata Sangiang perlu diarahkan menuju model partisipasi interaktif yang lebih berkelanjutan dan inklusif.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai negara. Sektor ini berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya dan pelestarian lingkungan (Pitana & Diarta, 2009). Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa pengembangan destinasi wisata harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem kepariwisataan yang utuh.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bima menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dalam mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini tercermin dalam Rencana Kerja Pariwisata Kabupaten Bima (2019) yang menekankan pentingnya pengembangan daya tarik wisata lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang memiliki nilai strategis adalah Desa Sangiang, yang dikenal melalui kekayaan budaya maritim, tradisi pembuatan kapal phinisi, serta atraksi alam seperti Gunung Api Sangiang, pantai, savana, dan sumber air panas belerang. Jika dikelola secara terencana dan berbasis pada pemberdayaan komunitas, berbagai potensi ini dapat menguatkan Desa Sangiang sebagai destinasi wisata unggulan.

Namun demikian, pengembangan destinasi wisata tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) menegaskan bahwa masyarakat lokal seharusnya terlibat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan desa wisata (Sunaryo, 2013). Observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sangiang mulai terlibat dalam kegiatan pariwisata seperti festival budaya dan aktivitas UMKM. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut masih sebatas partisipasi teknis dan belum mencakup peran strategis dalam pengambilan keputusan. Kesempatan masyarakat untuk terlibat secara substansial masih terbatas, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang menekankan partisipasi dan realitas implementasi di lapangan.

Keterbatasan partisipasi masyarakat ini dapat disebabkan oleh rendahnya kapasitas, kurangnya akses informasi, minimnya pendampingan pemerintah, dan belum adanya mekanisme perencanaan serta pengawasan yang bersifat partisipatif. Dalam perspektif teori partisipasi, kondisi tersebut mengarah pada bentuk partisipasi simbolis atau tokenism, sebagaimana dikemukakan dalam Tangga Partisipasi Arnstein (1969) dan Tipologi Partisipasi Pretty (1995). Apabila kondisi ini tidak diatasi melalui pendekatan pemberdayaan yang tepat, maka pengembangan Desa Wisata Sangiang berpotensi tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Sangiang, khususnya pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan mengacu pada teori partisipasi Arnstein dan Pretty, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai posisi partisipasi masyarakat saat ini serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan partisipasi masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Sangiang Kabupaten Bima. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah, & Tabrani, 2015). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang melibatkan Ketua Pokdarwis Kabupaten dan Desa, pemerintah desa, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman kontekstual yang komprehensif.

Analisis data menggunakan Model Analisis Interaktif Miles, Huberman, & Saldaña (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan konsistensi temuan. Penelitian dilaksanakan langsung di Desa Sangiang sebagai lokasi yang memiliki potensi wisata besar namun masih menghadapi kendala dalam partisipasi masyarakat. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam dan memberikan pemahaman yang relevan sebagai dasar pengembangan desa wisata berkelanjutan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Sangiang di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis alam dan budaya. Desa ini dikenal melalui kekayaan tradisi maritim serta keterampilan pembuatan kapal phinisi yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, Desa Sangiang menawarkan berbagai daya tarik wisata seperti Gunung Api Sangiang, Pantai Sangiang, padang savana, sumber air panas belerang, budaya tenun, parade perahu layar, serta sentra kuliner khas seperti dodol Wera. Keragaman potensi tersebut menunjukkan adanya peluang yang kuat bagi desa ini untuk menjadi destinasi wisata unggulan apabila dikelola dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata di Desa Sangiang secara umum sudah mulai terlihat. Masyarakat menunjukkan sikap terbuka terhadap kedatangan

wisatawan domestik maupun mancanegara. Mereka turut terlibat dalam penyelenggaraan Festival Sangiang Api, menjual kerajinan tenun dan kuliner lokal, serta berinteraksi dengan wisatawan yang ingin menyaksikan atau mencoba proses menenun. Keterlibatan ini menandai adanya kesadaran awal masyarakat bahwa sektor pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi dan memperkuat identitas budaya lokal. Akan tetapi, bentuk partisipasi ini memerlukan pendalaman dan kelembagaan agar dapat berkembang dari sekadar keterlibatan teknis menuju pemberdayaan yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Sangiang dapat dianalisis berdasarkan tiga tahapan manajemen pembangunan pariwisata, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menerapkan pendekatan Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM) yang melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Pokdarwis, Karang Taruna, pengelola desa wisata, dan masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Kabupaten Bima menunjukkan bahwa masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, ide, masukan, dan keluhan dalam musyawarah perencanaan. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi menurut Sunaryo (2013), yaitu keterlibatan masyarakat dalam identifikasi masalah, pemetaan potensi, pengembangan alternatif program, dan analisis kebutuhan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan strategis tetap berada di tangan pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat pada tahap ini masih bersifat konsultatif.

Jika dievaluasi menggunakan Tangga Partisipasi Arnstein (1969), partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan berada pada tingkat *consultation*, yaitu masyarakat didengar tetapi tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Sementara menurut Tipologi Partisipasi Pretty (1995), tahap ini berada pada tingkat *participation by consultation*, yakni masyarakat dimintai pendapat tetapi belum memiliki peran dalam menentukan kebijakan. Dengan demikian, pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan masih berada pada tingkat partisipasi simbolis (*tokenism*) dan belum mencapai tahap kemitraan (*partnership*) atau pemberdayaan (*citizen power*).

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan yang telah disepakati bersama pemerintah. Mereka turut serta dalam festival budaya, kegiatan pentas seni, penyediaan produk UMKM, serta aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan wisata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa baru sebatas memberikan pelatihan dasar terkait UMKM, namun belum ada pendampingan intensif maupun legalisasi usaha. Kondisi ini berdampak pada minimnya kesiapan UMKM untuk bersaing dan memasarkan produk mereka secara profesional kepada wisatawan. Selain itu, program pelaksanaan pengembangan desa wisata masih terbatas dan belum mencakup pelatihan manajemen pariwisata, *hospitality*, maupun pengembangan produk kreatif yang diperlukan untuk memperkuat daya tarik wisata.

Dalam konteks teori Arnstein, partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan berada pada tingkat *placation*, yaitu masyarakat diberi peran, tetapi masih dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Menurut model Pretty, tahap pelaksanaan berada pada tingkat *functional participation*, di mana masyarakat

dilibatkan untuk mendukung kegiatan, namun tidak memiliki kontrol atas perencanaan dan tujuan program. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat sudah tampak dalam kegiatan wisata, bentuk partisipasi tersebut masih bersifat instrumental dan belum mencapai tingkat interaktif maupun swadaya (*self-mobilisation*) yang menjadi indikator pemberdayaan masyarakat.

Tahap pengawasan (*controlling*) merupakan tahapan yang paling lemah dalam pengembangan Desa Wisata Sangiang. Berdasarkan hasil wawancara, belum terdapat mekanisme evaluasi yang sistematis dan terstruktur antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat. Pengawasan umumnya dilakukan secara informal setelah kegiatan tertentu, seperti festival, tetapi tidak dilandasi oleh indikator keberhasilan yang jelas. Ketidakhadiran mekanisme pengawasan partisipatif menyebabkan kurangnya tindak lanjut terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi masyarakat, seperti minimnya pendampingan, lemahnya koordinasi, dan belum legalnya UMKM. Dalam perspektif Arnstein, tahap pengawasan masyarakat masih berada pada tingkat informing, di mana masyarakat hanya menerima informasi mengenai perkembangan program tanpa dilibatkan dalam evaluasi. Sementara menurut Pretty, tahap ini berada pada tingkat passive participation, yaitu masyarakat menjadi penerima informasi tanpa ruang untuk memberikan koreksi atau rekomendasi perbaikan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sangiang masih berada pada kategori partisipasi simbolis menurut kedua model teori tersebut. Masyarakat sudah terlibat, tetapi belum diberdayakan secara optimal dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan kegiatan, maupun pengawasan berkelanjutan. Meskipun masyarakat memiliki potensi dan antusiasme yang tinggi, keterlibatan mereka masih dibatasi oleh dominasi pemerintah dalam keputusan strategis, minimnya pendampingan teknis, serta belum adanya mekanisme evaluasi partisipatif yang memastikan masyarakat memiliki kontrol terhadap kegiatan wisata. Dengan demikian, untuk mendorong pengembangan Desa Wisata Sangiang yang berkelanjutan, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan terpadu, peningkatan fungsi Pokdarwis sebagai lembaga penggerak desa wisata, legalisasi UMKM, serta pembentukan mekanisme perencanaan dan evaluasi yang berbasis kemitraan dan pemberdayaan nyata (*interactive participation* dan *citizen power*) sebagaimana diidealkan oleh Arnstein dan Pretty.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sangiang memiliki potensi alam dan budaya yang sangat kaya untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis komunitas. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal akibat keterbatasan kapasitas masyarakat, legalitas UMKM, dan belum adanya tata kelola pariwisata yang terstruktur. Partisipasi masyarakat telah muncul dalam bentuk keterlibatan dalam festival, produksi kerajinan, dan aktivitas wisata, namun sifatnya masih dominan teknis dan belum menyentuh aspek strategis pengambilan keputusan.

Analisis menggunakan Model Partisipasi Arnstein (1969) dan Tipologi Pretty (1995) menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Sangiang masih berada pada level *consultation*, *placation*, dan *functional participation*—yang menunjukkan partisipasi simbolis (tokenism) dan belum mencapai pemberdayaan (*citizen power*). Tahap perencanaan dilakukan melalui forum PBM yang melibatkan masyarakat, namun keputusan akhir tetap dikendalikan pemerintah. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berperan sebagai pelaksana kegiatan wisata, tetapi tanpa dukungan kapasitas dan legalitas yang memadai. Sementara pada tahap pengawasan, partisipasi masih bersifat *passive participation*, karena tidak tersedia mekanisme evaluasi yang melibatkan warga secara aktif.

Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata Sangiang memerlukan transformasi partisipasi masyarakat dari pola konsultatif menuju pola partisipatif yang interaktif dan berbasis pemberdayaan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan Pokdarwis, legalisasi dan pengembangan UMKM, serta pembentukan sistem monitoring-evaluasi partisipatif yang transparan. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki tata kelola desa wisata, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari pariwisata dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh masyarakat Desa Sangiang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (2<sup>nd</sup> Edition). SAGE Publications.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Rencana Kerja Pariwisata Kabupaten Bima. (2019). Pemerintah Kabupaten Bima.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press.